



Judul : Banyak Pelaku UMKM Ditumbangkan Unicorn
Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tak Memiliki Daya Saing Banyak Pelaku UMKM Ditumbangkan Unicorn

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto berharap, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bisa lebih gencar lagi mengangkat daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, 70 persen UMKM yang ada saat ini tidak memiliki daya saing dan terancam tergilas oleh keberadaan *unicorn* yang dananya mayoritas dari luar negeri.

Darmadi mengatakan, di tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM sudah banyak melakukan program untuk perbaikan UMKM. Salah satu programnya, Bantuan Produktif Ultra Mikro (BPUM) yang merupakan inisiasi dari Presiden Jokowi. Adapun penerima BPUM ini menerima bantuan Rp 2,4 juta dan Rp 1,2 juta.

“Bantuan ini memang untuk usaha ultra mikro yang paling banyak terkena dampak pandemi Covid-19. Ya kita apresiasi revitalisasi UMKM ini,” kata politisi senior PDI Perjuangan ini di Jakarta, kemarin.

Darmadi berharap, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terus melindungi UMKM dari bahaya kapitalisme yang kini wujudnya banyak sekali masuk ke Indonesia.

Salah satunya adalah gerakan-gerakan dari unicorn yang membuat UMKM terdesak. Unicorn ini rata-rata pemegang sahamnya asing dan diduga banyak melakukan aksi *predatory pricing* di *platform online*

miliknya.

“Jadi banyak bakar-bakar uang di Indonesia, melakukan predatory pricing dengan menjual jauh di bawah harga pokok sehingga bisa mengakibatkan UMKM kita hancur,” kata Bendahara Megawati Institute ini.

Darmadi menangkap modus yang digunakan *platform digital* ini dengan menjual rugi berbagai produk di *marketplace*. Aksi bakar uang ini bertujuan menaikkan valuasi keuangan mereka, sehingga terlihat mencetak penjualan tinggi padahal mereka sebenarnya merugi.

“Jadi penjualan semu yang sesungguhnya diperoleh dengan cara menggadakan nilai penjualan mereka. Untuk bisa mengandalkan penjualan mereka ya melakukan predatory pricing. Itu yang banyak terjadi,” jelasnya.

Dia mendesak, Pemerintah bisa berpihak kepada para pelaku UMKM. Tidak boleh nasib pelaku UMKM diserahkan kepada sistem ekonomi kapitalis. Jalankan sistem ekonomi Pancasila di mana cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kalau dibiarkan oleh negara, UMKM tentu tidak bisa bersaing dengan usaha besar. Sebab, jika itu yang terjadi, maka akan ada 64,7 juta UMKM di Indonesia yang terancam tumbang,” tegasnya. ■ KAL